

KPU dan Panwaslu Labuhanbatu Koordinasi dengan Polres Labuhanbatu Mengenai Pengamanan Pilgubsu 2018



NUSANTARAEXPRESS, RANTAUPRAPAT - KPU Labuhanbatu dan Panwaslu Sekabupaten Labuhanbatu Raya temu ramah dengan Kapolres beserta pejabat utama Polres Labuhanbatu Kamis (11/1/2018) di Gedung Olah Raga jalan M.H.Thamrin No.7 Kelurahan Kota, kecamatan Rantau Utara pukul 14.00 WIB terkait pengamanan Pemilihan Gubernur (PilGub) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018.

Kapolres Labuhanbatu AKBP. FRIDO SITUMORANG, S.H., S.I.K. dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Masukan dari Kasat Intelkam Polres Labuhanbatu, bahwa pihaknya secepatnya akan membentuk Gakkumdu terkait Pilgubsu dikarenakan dikalangan masyarakat sudah sangat ricuh dengan panasnya persaingan para calon Gubernur Sumatera Utara.



Kapolres berharap, KPU Labuhanbatu agar berkoordinasi dengan KPU di kabupaten lain untuk memastikan jumlah DPT guna mengantisipasi pemilih ganda. Dengan begitu, kita berharap proses Pilgubsu di Kab. Labuhanbatu Raya berjalan dengan baik.

Sementara Ketua KPU Labuhanbatu Hj. IRA WIRTATI, S.Ag, M.Pd. mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Polres Labuhanbatu.

"Sesuai dengan Peraturan KPU terkait Pilgubsu secara serentak tahun 2018. Beberapa tahapan yang dilakukan adalah terus berkoordinasi dengan pihak Polres Labuhanbatu, baik sudah belangsung maupun yang akan berlangsung?.

Saat Ini, tambahnya pihaknya sudah menerima DP4 dari KPU RI melalui sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan tanggal 20 Januari 2018 akan dilaksanakan pemutakhiran data pemilih/coklit. Untuk Jumlah TPS di Kab. Labuhanbatu sebanyak 1001 TPS, sementara Regulasi baru, pemilih harus memiliki E-KTP sesuai dengan tempat/wilayah pemilihan.

"Untuk Logistik berupa kotak suara sudah ada dan cukup. Untuk Lokasi TPS ditempatkan pada lokasi yang strategis dan tidak terkena dampak banjir", jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ketua Panwas Kab.Labuhanbatu Utara RUDI ALPIJAR yang turut hadir menyampaikan temuan pihaknya di lapangan, bahwa ada indikasi potensi kerawanan pada Pilkada serentak tahun 2018, yakni adanya manipulasi data pemilih oleh penyelenggara. Adanya money Politic, penyalahgunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih (ASN TNI/Polri), terkait adanya ASN TNI/Polri melakukan pelanggaran.

Dengan begitu pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian jika menemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti menggunakan fasilitas negara, melakukan Kampanye hitam / Hoax berupa menghasut dan memecah belah.

Menanggapi hal itu Kabag Ops Polres Labuhanbatu KOMPOL JANNER PANJAITAN, S.H, M.H mengatakan, semua lini agar mensosialisasikan masalah penggunaan fasilitas negara. Kemudian Saat KPU melakukan pemetaan kerawanan agar melibatkan pers dan Polri.



Menanggapi pertanyaan Kanit I / Sospol Sat IK Polres Labuhanbatu, mengenai adanya permasalahan tapal batas yang ada di Desa Sei Meranti Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan, yang mana berbatasan dengan Kepenghuluan Bakti Makmur Kec.Bagan Seinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan bagaimana cara mengantisipasi adanya pemilihan ganda, dan pencegahan kampanye di tempat ibadah, dan keterlibatan ASN TNI Polri ?. Ketua Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu MAKMUR,SE.
Menjawab

Makmur menjelaskan, "Sosialisasi terhadap ASN TNI/Polri telah dilaksanakan, terkait pelanggaran, panwas akan menyurati komite ASN. Gakkumdu bisa memeriksa TNI, sementara untuk pemilih pemula TNI/Polri yang pensiun kita akan lakukan pendataan", jelasnya.

Ditambahkannya, ?Bahwa terkait kampanye ditempat ibadah, pihaknya akan melakukan soialisasi larangan kegiatan tersebut?.
tutupnya. [Uban